BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kesimpulan yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. Adapun terkait penerbitan izin kepemilikan senjata api hanya dapat dilaksanakan di tingkat Polda dan Mabes Polri. Namun berdasarkan pada Pasal 191 huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022, Kepolisian di tingkat Polres berhak untuk melakukan suatu penanggulangan terkait tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal. Dalam upaya mendeteksi tindak kriminalitas, Sat Intelkam Wasendak bertugas menyelidiki dan mengungkap kejahatan yang melibatkan senjata api non-organik TNI/Polri, serta mencegah penyalahgunaan senjata api ilegal. Selain itu, mereka juga melakukan pengamanan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan membangun kerja sama dengan masyarakat melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat agar melaporkan aktivitas mencurigakan terkait senjata api ilegal. Dalam kegiatan pengumpulan informasi (Pulbaket), Sat Intelkam Wasendak mengumpulkan dan mengelola data terkait tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal secara sistematis. Melalui analisis intelijen keamanan, mereka mengevaluasi informasi yang diperoleh untuk memprediksi potensi ancaman dan memberikan rekomendasi langkah

preventif kepada pimpinan guna mengurangi risiko tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.

2. Pada pelaksanaan penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil, Polres Metro Depok memiliki cara preventif yaitu melibatkan

pengecekan legalitas kepemilikan senjata api, melakukan inventarisasi penyalahgunaan senjata api dengan mengumpulkan data terkait jenis senjata, modus operandi, lokasi kejadian, dan dampaknya. Operasi Sendak Jaya juga dilaksanakan setiap tahun untuk menindak pelaku kejahatan yang terkait dengan senjata api ilegal. Cara represif yaitu Sat Intelkam Wasendak bertugas melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi peristiwa tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal. Jika diperlukan penyidikan, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Sat Intelkam Wasendak berfokus pada penyelidikan awal, sedangkan Satreskrim bertanggung jawab atas penyidikan untuk menemukan tersangka. Kendala yang dihadapi Sat Intelkam Polres Metro Depok adalah salinan dokumen atau tembusan senjata api pindah tangan atau hibah dari pemilik awal ke pemilik baru dari Polda dan Mabes Polri sering kali tidak disampaikan ke Polres Metro Depok, sehingga data kepemilikan senjata api di tingkat Polres sering kali tidak akurat yang menyulitkan pihak Polres Metro Depok untuk membedakan antara pemilik senjata api ilegal dan legal. Dalam mengatasi kendala tersebut, Sat Intelkam Wasendak memiliki strategi yang mencakup upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum yang

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sementara upaya represif melakukan razia rumah ke rumah dan dijalan, patrol, serta operasi intelijen yang bertujuan menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan hukum di masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh Peneliti sebagai berikut :

1. Kepada Sat Intelkam Wasendak Polres Metro Depok dalam melakukan penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil di wilayah hukumnya, diharapkan tetap selalu konsisten melakukan penyelidikan, membuat produk intelijen, patroli dan operasi sendak jaya secara rutin setiap tahunnya dan tentunya selalu membangun koneksi kerja sama dengan masyarakat agar tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
2. Kepada Polda dan Mabes Polri, dengan adanya Pasal Pasal 191 huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang senjata api diharapkan kedepannya memberikan tembusan data atas pindah tangan atau hibah kepada Polres Metro Depok agar suatu proses penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil dapat berjalan dengan lancar.